

Pengintegrasian Etika Lingkungan Hidup pada Mata Pelajaran PPKn di Sekolah Menengah

Syifa Siti Aulia

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

*Corresponding e-mail: syifasitiaulia@ppkn.uad.ac.id

Abstrak

Kelestarian lingkungan hidup menjadi masalah pada saat ini sebagai akibat dari pembangunan, kegiatan ekonomi dan industrialisasi. Peran warga negara diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan tempat hidup manusia. Siswa sebagai warga negara, partisipasi aktif warga negara dalam menjaga lingkungan harus dimulai terlebih dahulu dengan pemahaman etika lingkungan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengintegrasikan etika lingkungan hidup pada mata pelajaran PPKn. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa terdapat alternatif mengintegrasikan etika lingkungan hidup pada materi-materi PPKn di sekolah menengah pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.

Kata Kunci: Etika, Lingkungan Hidup, PPKn

PENDAHULUAN

Alam ini merupakan ruang hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Kelestarian ruang hidup pada saat ini menunjukkan penurunan kualitas. Lingkungan tempat manusia hidup terancam karena perilaku manusia yang merusak alam. Masalah lingkungan pada saat ini menghadapi posisi yang sulit akibat dari keberhasilan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pesat industri karena menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Sebuah konsekuensi yang menjadi masalah setiap negara. Jika melihat dari kaca mata lingkungan hidup, keberhasilan pembangunan ekonomi, pemerataan dan sebagainya harus diimbangi dengan kelestarian lingkungan hidup. Apabila kelestarian lingkungan hidup tidak dijaga maka lingkungan tempat hidup yang rusak akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Kerusakan lingkungan hidup ini dikategorikan sebagai kekerasan lingkungan. Kekerasan terhadap lingkungan yang meluas juga bisa dipandang sebagai bentuk akhir dari peradaban masyarakat bangsa yang menuju kehancuran bersama atau setidaknya tidaknya mencerminkan kesejajaran dengan berbagai bentuk kekerasan lain (Pranadji, 2005). Dengan demikian, masalah lingkungan hidup tidak bisa dipandang sebelah mata. Perlu peran serta seluruh komponen untuk bisa menyelaraskannya dengan pembangunan, kegiatan ekonomi, dan industrialisasi.

Dalam konteks sosial kewarganegaraan, peran warga negara menjadi sangat penting dalam menjaga kelangsungan ekosistem lingkungan. Dalam tradisi kewarganegaraan liberal (*liberal citizenship*), isu lingkungan tidak menjadi pokok kajian yang mendalam dan tidak menjadi merupakan tanggung jawab bersama, namun lebih pada hak individu. Sedikit berbeda dengan tradisi republikan (*republican citizenship*) yang memandang masalah ekologi adalah masalah tanggung-jawab bersama (Jagers, 2009). Lingkungan yang aman dan sehat merupakan suatu pra-kondisi untuk melaksanakan hak-hak yang ada, dan hak atas lingkungan harus dimasukkan ke dalam bagian dari hak asasi manusia, dan ketiga, pengakuan terhadap hak atas lingkungan (Dobson, 2003).

Sementara itu dalam tradisi republikan, isu masalah lingkungan merupakan "*common good*", di mana manusia memosisikan diri sebagai warga negara yang menjaga lingkungan dibandingkan memosisikan diri sebagai "*consumer*" seperti yang dikemukakan Pranadji di atas. Artinya, ada tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan. Mengenai kebaikan

bersama ditekankan adanya tanggung jawab bersama untuk menjaganya (2000). Pentingnya pelestarian lingkungan ini setidaknya harus menjadi perhatian dalam bidang pendidikan karena pendidikan adalah *transfer of values* untuk mengoptimalkan potensi manusia. Ada nilai-nilai kebaikan yang ditularkan pada peserta didik untuk mengarungi kehidupannya, tak terkecuali bagaimana mengelola lingkungan tempat dimana manusia hidup. Dalam konteks lain disebut sebagai untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu, maka muncul pemikiran untuk membangun kompetensi warga negara dalam bidang lingkungan hidup, yakni salah satunya mengedepankan isu mengenai warga negara dalam partisipasinya mendukung upaya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan menjadi hal sudah sering dikaji pada abad ini. Salah satu kajian yang dilakukan berkaitan dengan kompetensi pengetahuan warga negara untuk menjadi warga negara yang memiliki wawasan global sebagaimana diungkapkan dalam salah satu penelitian Gibson, Rimmington, & Landwehr-Brown (2008:17), bahwa aspek pengetahuan warga negara yang memiliki wawasan global dapat dibentuk antara lain “...*understanding of culture, diversity, globalization, interdependence, global irregularities, peace and conflict, nature and environment, sustainable development, possible future scenarios, social justice*”. Alam dan lingkungan dalam ranah pengetahuan antara lain berkaitan dengan warga negara yang menghargai keberadaan alam dan lingkungan tersebut dengan cara-cara partisipasi aktif warga negara.

Partisipasi aktif warga negara dalam menjaga lingkungan harus dimulai terlebih dahulu dengan pemahaman etika lingkungan. Partisipasi aktif warga negara dalam menjaga lingkungan harus dimulai terlebih dahulu dengan pemahaman etika lingkungan “sebagai sebuah studi tentang hubungan etik antara manusia dengan alam sekitar termasuk non-manusia yang mengisinya” (Sandler, 2013:1665). Keselarasan hubungan manusia dengan alam menjadi bagian penting mengenai etika lingkungan ini. Keselarasan hubungan manusia dengan alam menjadi bagian penting mengenai etika lingkungan ini. Etika lingkungan ini adalah bagian dari etika lingkungan yang menyangkut karakter terhadap lingkungan (Sandler, 2013). Peran sekolah untuk membentuk kompetensi warga sekolah yang beradab terhadap lingkungan dikemukakan oleh kajian Simmon mengenai kajian ekologis terdapat tujuh hal yang dapat membuat seseorang individu meleak lingkungan (McBride, Brewer, Berkowitz, & Borrie, 2013) yakni (1) terkait dengan masalah lingkungan (moralitas); (2) berkomunikasi dan menerapkan konsep ekologis; (3) bagaimana kesadaran manusia dalam mempengaruhi lingkungan; (4) pengetahuan tentang isu-isu lingkungan; (5) kemampuan untuk menciptakan, mengevaluasi, dan mengimplementasikan rencana aksi/kegiatan; (6) mendorong praktik dan mendukung kebijakan ramah lingkungan; (7) kemampuan untuk memajukan suatu perubahan.

Salah satu upaya pembentukan kompetensi ekologis warga negara adalah dengan memasukan materi-materi lingkungan hidup ke dalam pelajaran di sekolah. Mata pelajaran yang paling dekat dengan pembentukan kompetensi ini adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). PPKn mengemban misi yang berat yakni pembentukan warga negara yang baik menjadi salah satu misi utama pendidikan nasional Indonesia. Konsep warga negara yang baik memiliki pandangan yang beragam. Bagi kaum konservatif yang mengutamakan keteraturan, kenyamanan, dan kedamaian, tentu saja berbeda dengan kaum progresif yang menginginkan kemajuan, tantangan, dan inovasi (Suyato, Muryono, & Arpanudin, 2016). Namun secara garis besar ada tiga hal yakni pengetahuan dan pemahaman tentang menjadi warga informasi, mengembangkan keterampilan penyelidikan dan pendekatan, mengembangkan keterampilan partisipasi dan tindakan yang bertanggung jawab (Birz ea, 2000; Crick, 1998; Davies, Shirley, & C.Riley, 2003; Johnson & Morris, 2010; Kahne & Westheimer, 2003; Print & Lange, 2012; Veldhuis, 1997;

Veugelers, 2007). Kesemuanya itu dapat diwujudkan dalam pembentukan kompetensi ekologis, yakni pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan, membangun kecakapan, partisipasi, dan tanggung jawab dalam mengelola dan melestarikan lingkungan hidup. Sejauh mana peran PPKn dalam mengembangkan kompetensi ekologis warga negara dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satu aspek yang dilihat dari aspek urgensi dan integrasinya dalam mata pelajaran di sekolah. Oleh karena itu, kajian ini berusaha untuk mengungkapkan hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah melalui metode penelitian kualitatif didasarkan pada kajian penelitian yang berupaya untuk mengungkapkan urgensi dan model integrasi etika lingkungan hidup melalui mata pelajaran PPKn dengan latar penelitian yang natural yakni sekolah yang dengan menyatakan bahwa "*qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to make sense of, or to interpret, phenomena in terms of the meanings people bring to them*"(Mertens, 2010:225). Maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui urgensi dan integrasi PPKn dalam membentuk kompetensi ekologis warga negara. Fokus kajiannya adalah dengan wawancara mengenai urgensi kompetensi lingkungan hidup dan etika lingkungan hidup dalam mata pelajaran PPKn. Selain itu dilakukan analisis dokumen berupa silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengenai sejauh mana integrasi etika lingkungan hidup disematkan dalam perencanaan, proses dan penilaian PPKn.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pengembangan Mata Pelajaran PPKn di Sekolah dengan Mengintegrasikan Etika Lingkungan Hidup

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan etika lingkungan hidup di sekolah ke dalam mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang memiliki peluang besar untuk mengintegrasikan muatan etika lingkungan hidup adalah mata pelajaran PPKn. Berdasarkan hasil penelitian dari sekolah pemenang Adiwiyata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni MTs Negeri 9 Sleman dan SMA Negeri 1 Kalasan ditemukan fakta bahwa kedudukan mata pelajaran PPKn untuk mengemban misi membelajarkan etika lingkungan hidup sangat penting. PPKn di MTs Negeri 9 Sleman bertujuan menjadikan warga negara yang baik, maka salah satu indikator warga negara baik adalah menjaga lingkungan sekitarnya. Guru PPKn SMA Negeri 1 Kalasan tidak dapat memungkiri etika lingkungan hidup melekat pada pelajaran PPKn, namun demikian pelajaran lain pun mengemban misi yang sama untuk membelajarkan mengenai lingkungan hidup ini. Mengenai ciri khas mata pelajaran PPKn dalam membantu kedudukan sekolah Adiwiyata untuk penguatan etika lingkungan ciri utamanya ada pada tujuan PPKn itu sendiri yang secara sederhana mendidik siswa menjadi warga negara yang baik. Salah satu indikator warga negara baik adalah dengan menjaga kebersihan dirinya dan lingkungan sekitarnya. Pembiasaan di MTs 9 Sleman ini salah satunya dengan mewajibkan setiap siswa untuk menjaga satu tanaman yang mereka tanam agar sekolah menjadi hijau, asri dan udaranya segar. Dalam materi pelajaran juga disisipkan mengenai bagaimana menjaga lingkungan sekitar. Di SMA N 9 Sleman siswa perlu dibiasakan dan terus dibiaskan tanpa henti untuk disadarkan mengenai kelestarian lingkungan yang itu tidak hanya untuk dirinya saja saat ini namun harus dijadikan warisan bagi generasi yang akan datang. Fokus PPKn adalah menjadikan warga negara yang bisa bermanfaat tidak hanya untuk dirinya, akan tetapi untuk kebaikan umum juga. Lebih lanjut menurutnya bahwa pembiasaan untuk

membentuk karakter jauh lebih sulit untuk dibentuk daripada hanya sekadar menghafal materi. Anak SMA pada masa sekarang itu sudah pintar dalam hal teknologi untuk mencari tahu pelajaran, namun dalam hal pembentukan karakter baik harus terus dibiasakan. Contoh kecil saja adalah membuang sampah pada tempatnya.

Hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran PPKn dalam membantu kedudukan sekolah Adiwiyata untuk penguatan etika lingkungan ada pada konsistensi warga sekolah dalam pembiasaan perilaku beretika terhadap lingkungan. Program Adiwiyata di lingkungan pendidikan sekolah diharapkan ikut membantu menciptakan warga sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, sekaligus mendukung dan mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter beradab terhadap lingkungan. Di MTs 9 Sleman para siswa belum terlalu siap dengan program Adiwiyata. Tidak hanya siswa, para guru pun masih ada yang bingung bagaimana mengintegrasikan etika lingkungan hidup ini dalam keseharian di sekolah, karena guru mau tidak mau harus menjadi teladan atau contoh yang baik yang bisa ditiru siswa di sekolah. Hambatan di SMA Negeri 1 Sleman adalah pada siswa yang datang dari latar belakang beragam masuk ke SMA dengan konsep *green school*. Komponen warga sekolah terutama guru harus konsisten menyuarakan dan membiasakan diri menjadi contoh bagi siswanya bagaimana menjadi pribadi yang beradab terhadap lingkungan. Sekolah sebagai sarana pendidikan formal bagi manusia untuk membentuk etika dalam hidupnya memiliki peran yang sentral untuk membelajarkan masalah etika. Tidak hanya etika terhadap sesama manusia, juga etika terhadap alam tempat hidupnya. Oleh karena itu sekolah bisa juga menjadi sarana pembentukan etika lingkungan hidupnya. Artinya pembentukan kesadaran akan kelangsungan lingkungan hidup di mana manusia itu hidup. Kesadaran individu dalam masyarakat tentang lingkungan hidup dan kelestariannya saat ini sangat penting karena kerusakan dan pencemaran yang terus terjadi, kesadaran akan kelangsungan lingkungan hidup ini harus terus selalu diajarkan melalui aksi-aksi penyelamatan lingkungan hidup. Kepedulian lingkungan hidup merupakan wujud sikap mental individu yang direfleksikan dalam perilakunya dan bukan sepenuhnya talenta maupun insting bawaan, akan tetapi juga merupakan hasil dari suatu proses pendidikan dalam arti luas (Hamzah, 2013, p. 43). Salah asuh atau salah didik terhadap seorang individu bisa jadi akan menghasilkan karakter yang kurang terpuji terhadap lingkungan. Karena itu karakter yang baik haruslah dibentuk kepada setiap individu, sehingga setiap individu dapat menjiwai setiap tindakan dan perilakunya. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang telah menerapkan sistem dengan maksud untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Program Adiwiyata sendiri telah dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan berlanjut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertujuan untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup melalui kegiatan pembinaan, penilaian dan pemberian penghargaan Adiwiyata kepada sekolah. Pedoman pelaksanaan program Adiwiyata diatur dalam Peraturan Menteri LH Nomor 5 Tahun 2013.

Integrasi Etika Lingkungan Hidup Melalui Mata Pelajaran PPKn

Pentingnya integrasi mengenai etika lingkungan hidup melalui mata pelajaran PPKn di sekolah Adiwiyata dapat dilakukan dengan menambahkan kajian etika lingkungan hidup dalam perencanaan program pembelajaran di kelas. Salah satunya dengan menambahkan atau menyisipkan mengenai lingkungan hidup dalam kajian-kajian materi PPKn. Penyisipan materi etika lingkungan hidup ini berdasarkan kajian analisis silabus PPKn pada MTs Negeri

9 Sleman dan SMA N 1 Kalasan. Contoh mengintegrasikan materi etika lingkungan hidup pada kelas VII MTs disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Analisis Integrasi Etika Lingkungan Hidup di MTs

No	Kls	Materi	Analisis Integrasi Etika Lingkungan
1	VII	Perilaku sesuai norma yang berlaku dalam mengelola dan menjaga lingkungan hidup di sekitarnya.	Memperagakan atau menyimulasikan perilaku yang sesuai dengan norma masyarakat dalam rangka menjaga lingkungan hidup sekitarnya.
2	VIII	Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup.	Menyusun laporan hasil telaah tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan secara tertulis mengenai lingkungan hidup dan menyajikan hasil telaah di kelas serta memajang hasil telaah (display) di dinding kelas dengan bangga dan penuh rasa tanggung jawab
3	IX	Melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan dalam menjaga lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945	Menyajikan hasil telaah tentang kedaulatan dalam bidang lingkungan hidup yang sesuai dengan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh rasa tanggung jawab.

Mengintegrasikan etika lingkungan hidup pada materi PPKn kelas VII ini meliputi materi dari beberapa kompetensi dasar yang dipilih disesuaikan dengan etika lingkungan hidup sebagaimana tabel di atas. Pada salah satu “materi perilaku sesuai norma yang berlaku”, diintegrasikan mengenai “bagaimana mengelola dan menjaga lingkungan hidup sekitarnya”. Selanjutnya analisis terhadap materi PPKn dan integrasi etika lingkungan hidup ini dijabarkan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan “memperagakan atau menyimulasikan perilaku yang sesuai dengan norma masyarakat dalam rangka menjaga lingkungan hidup sekitarnya”. Pada beberapa kompetensi dasar ditambahkan materi-materi yang mendukung upaya pengintegrasian etika lingkungan hidup yakni: (1) perilaku sesuai norma yang berlaku dalam mengelola dan menjaga lingkungan hidup di sekitarnya, (2) bentuk kerja sama dalam menjaga lingkungan hidup, (3) menjaga lingkungan hidup sebagai wujud menjaga NKRI, (4) peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup, (5) peran tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI dan menjaga lingkungan hidup, (6) melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan dalam menjaga lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, (7) upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA dan konflik masalah lingkungan hidup, (8) makna harmoni keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, dan gender dalam Bhinneka

Tunggal Ika, (9) makna bela negara dalam bidang lingkungan hidup, dan (10) ancaman terhadap NKRI saat ini dalam menjaga lingkungan hidup.

Kesepuluh materi ini merupakan cara yang dilakukan oleh guru PPKn untuk membelajarkan etika lingkungan hidup bagi siswa SMP sebagai konsekuensi dari ditetapkannya MTs 9 Sleman sebagai sekolah Adiwiyata. Setelah materinya disusun langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan dalam pengalaman belajar siswa baik di dalam kelas maupun diluar kelas. Pengalaman belajar yang direncanakan diantaranya sebagai berikut, (1) memperagakan atau menyimulasikan perilaku yang sesuai dengan norma masyarakat dalam rangka menjaga lingkungan hidup sekitarnya, (2) mengamati tayangan video/gambar tentang kerja sama di berbagai bidang kehidupan di masyarakat yang tercipta atas dasar sikap saling menghargai dalam menjaga lingkungan hidup, (3) mengidentifikasi dan menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat dengan penuh tanggung jawab dalam menjaga lingkungan hidup, (4) mencari informasi dan mendiskusikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan kerja sama kelompok, (5) menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh dan menyimpulkan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup, (6) menyajikan hasil telaah kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup dengan rasa percaya diri, (7) melakukan gotong royong di sekolah untuk menjaga kebersihan dan keindahan sekolah, (8) menyimulasikan menghormati adat, kebiasaan masyarakat yang berbeda dalam menjaga lingkungan hidup sekitar, (9) menyusun laporan hasil telaah tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan secara tertulis mengenai lingkungan hidup dan menyajikan hasil telaah di kelas serta memajang hasil telaah (*display*) di dinding kelas dengan bangga dan penuh rasa tanggung jawab, (9) menyimulasikan peran tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI dan yang menjaga lingkungan hidup, (10) menyajikan hasil telaah tentang kedaulatan dalam bidang lingkungan hidup yang sesuai dengan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh rasa tanggung jawab, (11) menyajikan hasil telaah rencana tindakan dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat termasuk masalah lingkungan hidup dengan sikap saling menghargai, (12) menyajikan hasil telaah rencana tindakan dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah termasuk masalah lingkungan hidup dalam masyarakat dengan penuh tanggung jawab, (13) menyimulasikan peran mediator dalam menyelesaikan masalah social, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, dan gender, (14) mengidentifikasi / mengajukan pertanyaan tentang perjuangan mempertahankan NKRI dan ancaman terhadap NKRI saat ini dengan penuh disiplin dalam bidang lingkungan hidup, dan (15) mencoba menyusun dan menyajikan gagasan penguatan komitmen mempertahankan NKRI dalam bidang lingkungan hidup sebagai wujud syukur terhadap Tuhan YME. Dengan demikian, dari proses analisis dokumen perencanaan pembelajaran PPKn di MTs 9 Sleman dapat dikatakan telah mengarah pada pencapaian pembelajaran PPKn dengan mengintegrasikan etika lingkungan hidup dalam perencanaan pembelajarannya. Pada jenjang sekolah menengah atas, yakni di SMA Negeri 1 Kalasan, mengintegrasikan etika lingkungan hidup pada materi PPKn dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Integrasi Etika Lingkungan Hidup di SMA

No	Kls	Materi	Analisis Integrasi Etika Lingkungan
1	X	Perilaku peduli dan menjaga lingkungan alam sekitar sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Menampilkan perilaku peduli dan menjaga lingkungan alam sekitar sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2	XI	- Memelihara kebersihan lingkungan sebagai wujud pelaksanaan HAM - Perilaku menjaga lingkungan alam sekitar	Menampilkan perilaku memelihara kebersihan lingkungan sebagai wujud pelaksanaan HAM serta menjaga lingkungan sekitar
3	XII	- Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara - Kasus Pelanggaran Hak warga negara - Kewajiban Warga Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data, menganalisis, dan menyajikan data hak dan kewajiban warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup di sekitarnya - Mengamati video/film/gambar tentang kewajiban warga negara dalam bidang lingkungan hidup - Mengumpulkan data hak dan kewajiban warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup di sekitarnya - Menganalisis hak dan kewajiban warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup di sekitarnya - Menyajikan hasil telaahan hak dan kewajiban warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup di sekitarnya - Membaca dari berbagai sumber mengenai kasus-kasus pelanggaran terhadap lingkungan hidup - Mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran terhadap lingkungan hidup - Mengumpulkan data kasus-kasus pelanggaran terhadap lingkungan hidup - Menganalisis kasus-kasus pelanggaran terhadap lingkungan hidup - Menyajikan hasil pengumpulan data tentang Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara dalam bidang lingkungan hidup

Materi-materi yang terkait dan dikaitkan dengan etika lingkungan hidup di SMA N 1 Kalasan diantaranya adalah sebagai berikut (1) perilaku peduli dan menjaga lingkungan

alam sekitar sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (2) arti pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, (3) memelihara kebersihan lingkungan sebagai wujud pelaksanaan HAM, (4) perilaku menjaga lingkungan alam sekitar, (5) perilaku masyarakat yang menunjukkan sikap menjaga NKRI dari ancaman sosial budaya terutama dalam menjaga kelestarian alam sekitar (budaya hidup bersih, sehat, dan kepedulian terhadap alam) dan mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup), (6) hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara, (7) kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran, (8) kewajiban Warga Negara

Setelah materinya disusun langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan dalam pengalaman belajar siswa baik di dalam kelas maupun diluar kelas. Pengalaman belajar yang direncanakan diantaranya sebagai berikut

1. Menampilkan perilaku peduli dan menjaga lingkungan alam sekitar sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Memelihara kebersihan lingkungan dari pencemaran sampah, air, udara tanah sebagai wujud wawasan nusantara dalam aspek tri gatra dan panca gatra.
3. menjaga warisan budaya Yogyakarta terutama batik kas Yogyakarta sebagai wujud dari aspek budaya wawasan nusantara.
4. Menampilkan perilaku memelihara kebersihan lingkungan sebagai wujud pelaksanaan HAM serta menjaga lingkungan sekitar.
5. Perilaku masyarakat yang menunjukkan sikap menjaga NKRI dari ancaman social budaya terutama dalam menjaga kelestarian alam sekitar (budaya hidup bersih, sehat, dan kepedulian terhadap alam) dan mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup)
6. Mengumpulkan data, menganalisis, dan menyajikan data hak dan kewajiban warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup di sekitarnya.
7. Mengamati video/film/gambar tentang kewajiban warga negara dalam bidang lingkungan hidup.
8. Mengumpulkan data hak dan kewajiban warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup di sekitarnya.
9. Menganalisis hak dan kewajiban warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup di sekitarnya.
10. Menyajikan hasil telaahan hak dan kewajiban warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup di sekitarnya.
11. Membaca dari berbagai sumber mengenai kasus-kasus pelanggaran terhadap lingkungan hidup.
12. Mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran terhadap lingkungan hidup.
13. Mengumpulkan data kasus-kasus pelanggaran terhadap lingkungan hidup.
14. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran terhadap lingkungan hidup.
15. Menyajikan hasil pengumpulan data tentang Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara dalam bidang lingkungan hidup.

Dengan demikian, dari proses analisis dokumen perencanaan pembelajaran PPKn di SMA N 1 Kalasan dapat dikatakan telah mengarah pada pencapaian pembelajaran PPKn dengan mengintegrasikan etika lingkungan hidup dalam perencanaan pembelajarannya. Pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas ketika mata pelajaran PPKn dimulai dengan peran guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan, dengan penuh tanggungjawab dan kerja sama dalam menyiapkan media dan alat serta buku). Hal tersebut

mengindikasikan peran guru menjadi penting untuk membiasakan perilaku beretika lingkungan hidup dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan evaluasi mata pelajaran PPKn yang mengintegrasikan etika lingkungan hidup adalah dengan merinci indikator pencapaian kompetensi yang mengintegrasikan etika lingkungan hidup dengan mata pelajaran PPKn.

Pembahasan

Pembentukan kompetensi warga negara salah satunya mengedepankan isu mengenai warga negara dalam partisipasinya mendukung upaya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan menjadi hal yang banyak dikaji saat ini. Salah satu kajian yang dilakukan berkaitan dengan kompetensi pengetahuan warga negara untuk menjadi warga negara yang berwawasan global sebagaimana diungkapkan dalam salah satu penelitian Gibson, Rimmington, & Landwehr-Brown (2008), mengenai aspek pengetahuan warga negara yang berwawasan global dapat dibentuk antara lain adalah *nature and environment*.

Alam dan lingkungan dalam ranah pengetahuan antara lain berkaitan dengan warga negara yang menghargai keberadaan alam dan lingkungan tersebut dengan cara-cara partisipasi aktif warga negara. Oleh karena itu, etika lingkungan hidup merupakan suatu keharusan untuk diajarkan dalam lingkup pendidikan formal. Salah satu asumsi kesadaran lingkungan hidup berangkat dari pemikiran bahwa pendidikan lingkungan hidup di lingkungan sekolah merupakan modal dasar bagi pembentukan etika lingkungan pada lintas generasi (Mulyana, 2009). Kajian tersebut memberikan gambaran bahwa lingkungan sekolah sebagai aset potensial untuk membentuk warga negara yang aktif berpartisipasi dalam upaya menjaga lingkungan. Pembelajaran ekologis di dalam sekolah maupun di dalam mata pelajaran PPKn dapat memberikan pengetahuan bagi siswa sebagai pengalaman khusus yang membentuk sikap dan kebiasaan berperilaku beretika terhadap lingkungan. Pemilihan pendekatan yang tepat, strategi dan model pembelajaran dapat menentukan efektivitas pembelajaran yang menghasilkan pengetahuan yang lebih baik seiring dengan pembentukan sikap dan kebiasaan berperilaku baik. Karena hal ini, pendidikan merupakan pengatur moralitas dan tanggung jawab bersama untuk membentuk warga negara yang berwawasan lingkungan (Caney, 2005; Dobson, 2003; Gardiner, 2004; Miller, 2004). Namun demikian, hambatan mengintegrasikan etika lingkungan hidup adalah karena industrialisasi dan ideologi kewarganegaraan liberal di berbagai negara yang tidak fokus pada masalah lingkungan sehingga menyebabkan degradasi ekologi (John Barry, 2001; Eckersley, 2004; Miller, 2004). Sehingga kewarganegaraan ekologis terkait dengan gagasan kesejahteraan ekologis yang merupakan perluasan kewarganegaraan politik dan sosial, yang menjadi tuntutan sosial baru yang memerlukan perubahan mendalam dalam cara kerja serta dalam sistem produksi kapitalis (Sáiz, 2005)

Sekolah sebagai sarana pendidikan formal bagi manusia untuk membentuk etika dalam hidupnya memiliki peran yang sentral untuk membelajarkan masalah etika. Tidak hanya etika terhadap sesama manusia, juga etika terhadap alam tempat hidupnya. Oleh karena itu sekolah bisa juga menjadi sarana pembentukan etika lingkungan hidupnya. Artinya pembentukan kesadaran akan kelangsungan lingkungan hidup di mana manusia itu hidup. Kesadaran individu dalam masyarakat tentang lingkungan hidup dan kelestariannya saat ini sangat penting karena kerusakan dan pencemaran yang terus terjadi, kesadaran akan kelangsungan lingkungan hidup ini harus terus selalu diajarkan melalui aksi-aksi penyelamatan lingkungan hidup. Kepedulian lingkungan hidup merupakan wujud sikap mental individu yang direfleksikan dalam perilakunya dan bukan sepenuhnya talenta maupun insting bawaan, akan tetapi juga merupakan hasil dari suatu proses pendidikan

dalam arti luas (Hamzah, 2013). Salah asuh atau salah didik terhadap seorang individu bisa jadi akan menghasilkan karakter yang kurang terpuji terhadap lingkungan. Karena itu karakter yang baik haruslah dibentuk kepada setiap individu, sehingga setiap individu dapat menjiwai setiap tindakan dan perilakunya

Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang telah menerapkan sistem dengan maksud untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Program Adiwiyata sendiri telah dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan berlanjut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertujuan untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup melalui kegiatan pembinaan, penilaian dan pemberian penghargaan Adiwiyata kepada sekolah. Pedoman pelaksanaan program Adiwiyata diatur dalam Peraturan Menteri LH Nomor 5 Tahun 2013.

PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang dikembangkan di lingkungan pendidikan formal sekolah memiliki andil dalam membantu terlaksananya program Adiwiyata sebagai bentuk pendidikan lingkungan hidup. PPKn dengan pengembangannya sebagai mata pelajaran di sekolah memiliki tugas membantu peserta didik untuk memiliki kompetensi partisipasi warga negara beradab terhadap lingkungan. Berdasarkan satu kajian mengungkapkan bahwa terdapat tujuh hal yang dapat membuat seseorang individu melek lingkungan menurut Simmon (1995) dalam (McBride et al., 2013) yakni terkait dengan masalah lingkungan (moralitas); (2) berkomunikasi dan menerapkan konsep ekologis; (3) bagaimana kesadaran manusia dalam mempengaruhi lingkungan; (4) pengetahuan tentang isu-isu lingkungan; (5) kemampuan untuk menciptakan, mengevaluasi, dan mengimplementasikan rencana aksi/kegiatan; (6) mendorong praktik dan mendukung kebijakan ramah lingkungan; (7) kemampuan untuk memajukan suatu perubahan.

Dalam konteks kewarganegaraan, dikenal kewarganegaraan aktif yang cocok untuk menggambarkan kompetensi ekologi warga negara. Kewarganegaraan aktif (*active citizenship*) merupakan pemberdayaan individu, memungkinkan mereka merasa nyaman dalam budaya demokratis, dan merasa bahwa mereka dapat membuat perbedaan dalam komunitas yang mereka jalani (European Economic and Social Committee, 2012). Setiap individu mungkin aktif di komunitas mereka dengan berbagai cara. Beberapa orang memilih untuk terlibat secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka di tingkat lokal, sementara yang lain mungkin ingin melakukan sesuatu untuk membuat perbedaan pada penyebab yang berdampak secara global. Melihat dari dimensi kewarganegaraan, maka kompetensi ekologi berkaitan dengan kewarganegaraan sebagai praktik dan kewarganegaraan sebagai rasa (Osler & Starkey, 2005). Artinya warga negara memiliki peran aktif dan rasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sebagai bentuk partisipasi aktif mereka dalam kehidupan di sekolah, dan masyarakat. PPKn dan pengembangannya di lingkungan sekolah sebagai bentuk pendidikan nilai, moral dan watak memiliki andil dalam pembentukan melek lingkungan sebagaimana dikemukakan bahwa "...PPKn di Indonesia bertujuan untuk menghasilkan warga yang demokratis yaitu warga negara yang cerdas dan memanfaatkan kecerdasannya sebagai warga negara untuk kemajuan diri dan lingkungannya" (Wahab & Sapriya, 2011).

Dalam proses pembelajaran PPKn ini, metode yang bisa dikembangkan dan dipakai adalah metode *problem based learning* yang dapat meningkatkan *ecological literacy* (Riyadi, Prayitno, & Karyanto, 2018). Salah satu solusi dalam mengajar literasi ekologis adalah dengan memberikan masalah pada isu lingkungan karena dengan itu, seseorang akan berperilaku lebih bertanggung jawab dalam melindungi lingkungan (Shamuganathan &

Karpudewan, 2015) Sikap siswa dengan membahas masalah lingkungan dapat menjadi lebih ramah terhadap lingkungan seperti yang dijelaskan oleh Fishbein dan Ajzen (2003) dalam penelitian yang telah dilakukan. sikap peduli lingkungan yang dimiliki juga mengacu pada jumlah kesadaran lingkungan dan dipengaruhi oleh sikap yang dimiliki untuk melakukan tindakan tertentu (Ajzen, Joyce, Sheikh, & Cote, 2011; Vining & Ebreo, 1992). Dengan demikian, kesadaran ekologis merupakan komitmen pribadi untuk belajar lebih banyak tentang lingkungan dan mengambil tindakan lingkungan yang bertanggung jawab sehingga mendorong individu, komunitas, dan organisasi untuk berpikir tentang hak dan tanggung jawab lingkungan yang kita semua miliki sebagai penduduk bumi (Bell, 2005). Sikap terhadap lingkungan ini senada dengan sikap yang dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan global sebagaimana disarikan Murdiono (2014:356) yakni “rasa identitas dan harga diri, empati, komitmen terhadap keadilan sosial dan kejujuran, menghormati keragaman, kepedulian terhadap lingkungan dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, dan keyakinan bahwa orang dapat menciptakan perbedaan”.

KESIMPULAN

Mengintegrasikan etika lingkungan hidup penting dilakukan di lingkungan sekolah Adiwiyata dan dalam pelajaran PPKn untuk menumbuhkan kompetensi ekologis siswa. Pentingnya integrasi etika lingkungan hidup ini memerlukan pembiasaan yang terus menerus dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengintegrasian etika lingkungan hidup. MTs 9 Sleman dan SMA 1 Kalasan telah mengintegrasikan etika lingkungan hidup dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran PPKn. Hal ini terbukti dengan mengaitkan materi-materi yang ada di dalam kurikulum dengan pemahaman dan pembiasaan sikap terhadap lingkungan hidup.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan pada Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan kesempatan penelitian ini. Tidak lupa juga penulis sampaikan terima kasih pada responden di MTs 9 Sleman dan SMA Negeri 1 Kalasan atas bantuan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I., Joyce, N., Sheikh, S., & Cote, N. G. (2011). Knowledge and the prediction of behavior: The role of information accuracy in the theory of planned behavior. *Basic and Applied Social Psychology*, 33(2), 101–117. <https://doi.org/10.1080/01973533.2011.568834>
- Barry, J. (2001). Greening liberal democracy: practice, theory and political economy. In J. Barry & M. Wissenburg (Eds.), *Sustainable liberal democracy. Ecological challenges and opportunities* (pp. 59–80). Basingstoke: Palgrave.
- Bell, D. R. (2005). Liberal environmental citizenship. *Environmental Politics*, 14(2), 179–194. <https://doi.org/10.1080/09644010500054863>
- Bîrzéa, C. (2000). *Education for democratic citizenship: A lifelong learning perspective. Project On “Education for Democratic Citizenship”* (Vol. 21). Strasbourg.
- Caney, S. (2005). Cosmopolitan justice, responsibility, and global climate change. *Leiden Journal of International Law*, 18(4), 747–775. <https://doi.org/10.1017/S0922156505002992>

- Crick, B. (1998). *Education for citizenship and the teaching of democracy in schools. Final report of the advisory group on citizenship*. London. <https://doi.org/10.1177/014473949901900204>
- Curry, P. (2000). Redefining community: towards an ecological republicanism. *Biodiversity & Conservation*, 9(8), 1059–1071.
- Davies, I., Shirley, I. G., & C. Riley. (2003). *Good citizenship and educational provision. British Educational Research Journal* (Vol. 27). London and New York: Falmer Press and Taylor & Francis.
- Dobson, A. (2003). *Citizenship and the environment*. New York: Oxford University Press Inc.
- Eckersley, R. (2004). *The green state*. Cambridge: Cambridge University Press.
- European Economic and Social Committee. (2012). *Active citizenship for a better European society*. Brussel: EESC. <https://doi.org/10.1145/2379636.2379663>
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (2003). Attitudes towards objects as predictors of single and multiple behavioral criteria. *Social Psychology: Social Cognition and Perception*, 1, 325–347.
- Gardiner, S. M. (2004). Ethics and global climate change. *Ethics*, 114(3), 555–600. <https://doi.org/10.1086/382247>
- Gibson, K. L., Rimmington, G. M., & Landwehr-Brown, M. (2008). Developing global awareness and responsible world citizenship with global learning. *Roeper Review: A Journal on Gifted Education*, 30(1), 11–23. <https://doi.org/10.1080/02783190701836270>
- Hamzah, S. (2013). *Pendidikan lingkungan sekelumit wawasan pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Jagers, S. C. (2009). In search of the ecological citizen. *Environmental Politics*, 18(1), 18–36. <https://doi.org/10.1080/09644010802624751>
- Johnson, L., & Morris, P. (2010). Towards a framework for critical citizenship education. *The Curriculum Journal*, 21(1), 77–96. <https://doi.org/10.1080/09585170903560444>
- Kahne, J., & Westheimer, J. (2003). Teaching democracy: what schools need to do. *Phi Delta Kappan*, 85(1), 34–40, 57–66. <https://doi.org/10.1177/003172170308500109>
- McBride, B. B., Brewer, C. A., Berkowitz, A. R., & Borrie, W. T. (2013). Environmental literacy, ecological literacy, ecoliteracy: what do we mean and how did we get here? *Ecosphere*, 4(5), 1–20.
- Mertens, D. M. (2010). *Research and Evaluation in Education and Psychology: Integrating Diversity with Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods. 3rd ed.* London; California; New Delhi; Singapore: SAGE Publication. Inc.
- Miller, D. (2004). Holding nations responsible. *Ethics*, 114 (2), 240–268.
- Mulyana, R. (2009). Penanaman etika lingkungan melalui sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. *Jurnal Tabularasa PPS Unimed*, 6(2), 175–180.
- Murdiono, M. (2014). Pendidikan kewarganegaraan untuk membangun wawasan global warga negara muda. *Cakrawala Pendidikan*, XXXIII (3), 349–357.
- Osler, A., & Starkey, H. (2005). *Changing citizenship. Democracy and inclusion in education*. New York, NY: Open University Press. <https://doi.org/10.1177/1746197906068125>
- Pranadji, T. (2005). Kesenakahan, kemiskinan dan kerusakan lingkungan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 3(4), 313–325.

- Print, M., & Lange, D. (2012). *School, curriculum and civic education for building democratic citizens*. (M. Print & D. Lange, Eds.). Rotterdam, Boston, Taipei: Sense Publishers.
- Riyadi, I. P., Prayitno, B. A., & Karyanto, P. (2018). The effectiveness of subject specific pedagogy based on problem-based learning to empower student's ecological literacy. *Cakrawala Pendidikan, XXXVII* (1), 212–222.
- Sáiz, A. V. (2005). Globalisation, cosmopolitanism and ecological citizenship. *Environmental Politics, 14*(2), 163–178. <https://doi.org/10.1080/09644010500054848>
- Sandler, R. L. (2013). Environmental virtue ethics. In H. LaFollette (Ed.), *The international encyclopedia of ethics* (pp. 1665–1674). West Sussex: Blackwell Publishing Ltd.
- Shamuganathan, S., & Karpudewan, M. (2015). Modeling environmental literacy of malaysian pre-university students. *International Journal of Environmental and Science Education, 10*(5), 757–771. <https://doi.org/10.12973/ijese.2015.264a>
- Suyato, Murdiono, M., Mulyono, B., & Arpanudin, I. (2016). Upaya pembentukan warga negara yang baik dan tantangan yang dihadapi oleh para guru PKn peserta SM3T 2015. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 13*(2), 137–150. <https://doi.org/10.21831/civics.v13i2.12737>
- Veldhuis, R. (1997). *Education for democratic citizenship: Dimensions of citizenship, core competences, variables and international activities*. Strasbourg.
- Veugelers, W. (2007). Creating critical-democratic citizenship education: empowering humanity and democracy in dutch education. *Compare: A Journal of Comparative and International Education, 37*(1), 105–119. <https://doi.org/10.1080/03057920601061893>
- Vining, J., & Ebreo, A. (1992). Predicting recycling behavior from global and specific environmental attitudes and changes in recycling opportunities 1. *Journal of Applied Social Psychology, 22*(20), 1580–1607.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan landasan pendidikan kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.

